ARAH POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

FIRDAUS
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
firdausdiezo@gmail.com

Abstrak: Pasca reformasi terjadi perubahan kekuasan kehakiman dalam negara hukum Indonesia, meskipun begitu perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman masih memuat frasa tentang "negara", berdasarkan pancasila dan berdasarkan negara hukum republik Indonesia, artinya kesuasaan kehakiman dijalankan dengan merdeka tanpa interpensi eksekutif dan legislatif dan lembaga yang lain. Sebagai lembaga penjaga konstitusi MK dalam kewenangannya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik secara formil (pembentukan UU) atau secara materil (materi UU), dalam proses pengujian itu MK tidak saja mengoreksi undang-undang berdasarkan UUD 1945, tapi juga telah merubah substansi UUD 1945 tanpa mengubah teksnya.
Kata Kunci: Politik Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, mampu menempatkan hukum sebagai panglima. Implementasi *rule of law* adalah aturan-aturan yang menitik beratkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi *absolutisme* yang mengarah kepada *onrechmatige daad*. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya konstitusi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Sebab kekuasaan yang tidak terbatas cenderung disalahgunakan.

Pengaturan dan pembatasan kekuasaan harus tercermin dalam suatu peraturan yang berintikan keadilan. Pembatasan kekuasaan adalah negara memberi peluang kepada kekuasaan kehakiman untuk menjadi lembaga yang mandiri dan tidak tunduk pada penguasa. Hal itu tampak dalam amanat Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 *"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"*. Dengan demikian salah satu prinsip negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional, terlebih tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Arah politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia menarik untuk diperbincangkan, karena dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia kekuasaan kehakiman salah satu studi yang menjadi sorotan, karena perjalanan ketatanegaraan Indonesia terjadi dinamika dalam kekuasaan kehakiman. Hal itu tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 dan hadirnya gerakan reformasi tahun 1998 yang telah menyebabkan empat kali Amandemen terhadap UUD 1945 sejak tahun 1999 hingga 2002.

Amandemen Ketiga UUD 1945 salah satu peletak kunci dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, dimana pada tahun 2001 dibentuk suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK) yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA). Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyebut *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".*

Mengiringi perubahan Amandemen UUD 1945 di atas, perubahan juga terjadi dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Sekalipun perubahan undang-undang kehakiman terjadi sejak awal reformasi bergulir. Mulai dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hingga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Persoalan di atas menggambarkan dinamika kekuasaan kehakiman di Indonesia sehingga menjadi lembaga yang mandiri secara konstitusi. Makalah ini akan menyoroti arah politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca reformasi. Penulis pada makalah ini akan mengkaji arah politik hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berfokus kepada arah kekuasaan kehakiman pasca reformasi.

B. Metodologi Penelitian

Bertitik dari latar belakang tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: *Bagaimana Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Reformasi.* Menggunakan metodologi penelitian hukum. Pembahasan ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis ‘’Arah Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Pasca Reformasi’’

C. Hasil dan Pembahasan

1. Politik Pembangunan Hukum Kehakiman di Indonesia

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjamahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Dalam Bahasa Indonesia “*recht*” berarti hukum dan “*politiek*” di dalamnya terkandung pula arti *beleid* atau biasa diterjemahkan sebagai kebijaksanaan atau kebijakan (*policy*). LJ. van Appeldoorn menyebut istilah politik hukum dengan istilah politik perundang-undangan. Politik hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Moh. Mahfud MD memberikan definisi tentang politik hukum sebagai (*legal policy*) atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum maupun penggantian hukum lama dalam mencapai tujuan negara. Padmo Wahjono memberikan definisi bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.

Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan dalam studi politik hukum, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada, kemudian cara-cara apa, dan yang mana yang paling baik untuk bisa digunakan mencapai tujuan. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan bagaimana sebaiknya cara perubahan itu dilakukan. Kemudian dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan secara baik. Berkaca pada pengertian politik hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum merupakan garis kebijakan hukum yang diambil *ius constitutum* (hukum yang sedang berlaku) maupun yang akan dibuat *ius constituendum* (hukum yang akan diberlakukan) demi peraturan hukum yang lebih baik. Sejurus dengan itu masalah arah politik hukum kekuasaan kehakiman akan selalu berupa keharusan atau kebijaksanaan untuk mengadakan suatu pilihan terhadap hukum mana yang harus dibentuk dan diberlakukan, serta ke arah mana hukum hendak dikembangkan dalam suatu wilayah negara yang sesuai dengan kesadaran hukum dan pergaulan hidup masyarakatnya.

Subsitem politik mempunyai tingkat deteminasi yang lebih tinggi dari pada subsistem hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Tampilnya kekuasaan pemerintahan negara yang sangat hegemonik pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam rangka negara kesejahteraan

(*wetfare state*), tentu mengganggu keseimbangan relasi kekuasaan (*check and balance*) yang ada, dan pada akhirnya mempengaruhi kerja kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu; *pertama*, kemandirian lembaganya. Parameternya adalah integritas lembaga peradilan tidak terpengaruh kepada lembaga lain dalam menjalankan tugasnya, seperti kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga-lembaga lainnya. Juga campur tangan secara hierarki ke atas, sehingga secara formal memengaruhi kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan; *kedua*, kemandirian proses peradilan; dan *ketiga* kemandirian hakimnya. Pasal 24 dan 25 UUD 1945 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan negara yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif) dan kekuasaan pembuat undang-undang (legislatif). Sehingga adanya jaminan konstitusi terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka tentu saja bebas dari pada campur tangan pihak kekuasaan negara lain.

Perubahan politik hukum kekuasaan kehakiman di antaranya dapat dilihat dari perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman, yaitu penambahan frasa tertentu dalam menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 1 UU No. 2004 menyatakan, *kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.* Jika dibandingkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 jelas berbeda karena terjadi penambahan frasa "negara", "berdasarkan Pancasila", dan "demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Saldi Isra mengatakan bahwa, Pasal 1 UUU No. 4 Tahun 2004 nyaris tidak ada perbedaan dengan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970, hanya saja di Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 terdapat perbedaan, seperti: *''Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia''.*

Sementara, di Penjelasan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 menyatakan: *''Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh Undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia''*.

Di samping tidak mudah untuk memaknai frasa "berdasarkan Pancasila" dan "demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia", dengan tetap dipertahankan kata "negara" dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 maupun UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap potensial dipengaruhi oleh pemerintah. Dalam teori tentang negara (*general theory of state*), Krabbe mengatakan bahwa kata "negara" sering diidentifikasikan dengan "pemerintah" apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian "kekuasaan negara" atau "kemauan negara". Sementara dalam praktik, sepanjang kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah begitu dominan mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Artinya, dengan tetap mempertahankan kata "negara" baik dalam UU No. 4 Tahun 2004 maupun dalam UU No. 48 Tahun 2009, pengaruh pemerintah masih sulit untuk dihindari dalam kekuasaan kehakiman.

2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Seperti yang telah di singgung di atas, bahwa pasca reformasi ketika Amandemen Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan dengan hadirnya MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, di samping MA. Jika dilihat secara sekilas, kehadiran MK berangkat dari praktik hukum di Amerika Serikat pada 1803 silam, yaitu berangkat dari kasus "Marbury versus Madison" tahun 1803. Kasus ini bermula dari perselisihan politik antara Thomas Jefferson dan Jhon Quincy Adams. Waktu itu, Presiden Jhon Quincy kalah melawan Thomas Jefferson pada pemilihan presiden 1800. Namun di masa-masa peralihan atau menjelang pelantikan Jefferson 4 Maret 1801, Adams membuat keputusan penting yaitu mengusulkan kepada senat pengangkatan William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, William Harper dan beberapa hakim lainnya sebagai Hakim Perdamaian (*justice of peace*) di daerah Washington (*county of Washington*), distrik Kolumbia (*the district of Columbia*) di malam terakhir kepemimpinannya di Gedung Putih. Tindakan itu disetujui Senat dan ditandatangani Presiden. Menteri Luar Negeri yaitu James Madison pada kabinet Jefferson ditunjuk untuk mengirimkan surat pengangkatan. Namun, surat itu tidak dikirimkan keempat orang hakim, yaitu William Madbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend H, dan William Harper. Alasan Madison menolak karena pemerintahan yang baru menolak kebijakan pemerintahan Adams.

Kemudian, keempat hakim tersebut yang diinisiasi oleh William Marbury menggugat ke Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat yang diketuai John Marshall sesuai kewenangannya memerintahkan Pemerintah Federal mengeluarkan surat perintah (*Writ of Mandamus*) pengangkatan yang sudah ditekan presiden. MA dalam putusannya membenarkan bahwa pemerintahan John Adams telah melakukan semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum, sehingga William Marbury dan kawan-kawan dianggap memang berhak atas surat-surat pengangkatan. Namun, MA menyatakan tidak berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah untuk menyerahkan surat pengangkatan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Amerika Serikat (*Judiciary Act 1789*) karena dinilai bertentangan dengan *Article III Section 2* Konstitusi Amerika Serikat. Kasus ini menjadi cikal bakal pendirian MK sebagai lembaga *''penguji undang-undang terhadap konstitusi''* di banyak negara sampai sekarang.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan pembentukan peradilan pengujian undang-undang terhadap UUD telah diusulkan dalam sidang BPUPKI 15 Juli 1945. Usulan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin dengan sebutan lembaga yang berwenang *''membanding-undang-undang''* supaya diakomodir dalam rumusan UUD 1945. Menurut Muhammad Yamin: *''.....Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman dan membanding Undang-undang supaya sesuai dengan hukum adat, hukum Islam (Syariah) dan dengan Undang-undang Dasar dan melakukan aturan pembatalan Undang-undang, pendapat Balai Agung disampaikan kepada Presiden, yang mengabarkan berita itu kepada Dewan Perwakilan…''*
''.....Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding, apakah Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan, tidak melanggar Undang-undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah tidak bertentangan dengan syariah agama Islam……''

Usulan Yamin di atas ditolak oleh Soepomo, akhirnya dilakukan voting dengan hasil lebih dari separuh anggota sidang BPUPKI yang hadir menolak usulan Yamin. Alasan Soepomo: *"... Tentang Mahkamah Agung, Tuan Yamin menghendaki supaya Mahkamah Agung itu mempunyai hak juga untuk memutus, bahwa sesuatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau dengan syariah...". Anggota Yamin (Mengoreksi Soepomo): Undang-undang Dasar, atau hukum adat, atau syariah. Anggota Soepomo: "... Pertama tentang yang dikehendaki oleh Tuan Yamin supaya ditetapkan, bahwa Mahkamah Agung berhak*

menetapkan, bahwa sesuatu Undang-undang Dasar bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Sistem demikian itu memang ada, yaitu di Amerika dan juga di negeri Jerman pada zaman Konstitusi Weimar, jadi di Republik Jerman sesudah perang dunia. Ada juga di negeri Austria, di Ceko-Slowakia sesudah perang dunia kesatu. Juga di Austria. Tetapi apa artinya sistem itu? Sistem itu tidak ada di Prancis, tidak ada di Inggris, tidak ada di Belanda, di Dai Nippon juga tidak ada. Tetapi kita harus mengetahui apa arti sistem itu, sebab sudah tentu sebelum memakainya, kita harus mengetahui betul sistem itu. Sistem yang dipakai di dalam negeri Belanda berdasarkan materieel recht, yaitu satu konsekuensi daripada sistem Trias Politica, yang memang di Amerika betul-betul dijalankan dengan sesempurna-sempurnanya. Juga di Filipina, oleh karena Undang-undang Dasar-nya memang berdasar atas model sistem Amerika, yaitu dalam pengertian negara yang berdasar atas Liberale democratie, yang memisah-misahkan badan-badan penyelenggara semuanya; sebagai kesempurnaan sistem itu memang sudah selayaknya Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi mempunyai hak seperti yang dianjurkan oleh Tuan Yamin. Akan tetapi di negeri democratie perbedaan atau perpisahan antara tiga jenis kekuasaan itu tidak ada. Menurut pendapat saya, Tuan Ketua, dalam rancangan Undang-undang Dasar ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan principle 3 badan itu, artinya tidaklah, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk Undang-undang. Memang maksud sistem yang diajukan oleh Yamin, ialah supaya kekuasaan kehakiman mengontrole kekuasaan Undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmu negara ternyata bahwa antara para ahli tata-negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Apa sebabnya? Undang-undang Dasar hanya mengenai semua aturan yang pokok dan biasanya begitu lebar bunyinya, sehingga dapat diberi interpretasi demikian, bahwa pendapat A bisa selaras, sedang pendapat B pun bisa juga. Jadi, dalam praktik, jikalau ada perselisihan tentang soal, apakah sesuatu Undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar atau tidak, itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis; oleh karena itu mungkin -dan di sini dalam praktik begitu, pula ada conflict antara kekuasaan sesuatu Undang-undang dan Undang-undang Dasar. Maka menurut pendapat saya sistem itu tidak baik buat Negara Indonesia, yang akan kita bentuk. Kecuali itu Paduka Tuan Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para ahli hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan Tuan Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Ceko-Slowakia dan Jerman waktu Weimar bukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan spesial, constitutioneel-hof, -sesuatu pengadilan spesifik- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya, mengerjakan persoalan itu….''

Menurut Jimly Asshiddiqie (2008), usul Yamin dengan istilah *''membanding undang-undang''* tidak dapat diterima oleh rapat BPUPKI dan Soepomo dapat ditarik kepada dua alasan, yaitu; *pertama*, UUD 1945 dibangun menurut prinsip-prinsip yang tidak didasarkan atas teori *trias politica* Montesquieu. *Kedua*, jumlah sarjana hukum masa awal kemerdekaan belum cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Soepomo menyatakan bahwa untuk memberikan kewenangan membanding undang-undang ke MA diperlukan studi yang mendalam terhadap *Verfassungsgerichtshof* atau MK seperti di Austria, Cekoslovakia, dan Jerman di masa *Weimar* yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hanya saja pada waktu, fungsi mambanding undang-undang yang diusulkan Yamin diberikan kewenangannya pada MA, bukan dengan lembaga yang berdiri sendiri.

Setelah melewati diskusi panjang dan mendalam, akhirnya MK dibentuk di Indonesia melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap*

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian dalam Pasal 24C ayat (2) dinyatakan: *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*

Berdasarkan Undang-undang tentang Mahkamah konstitusi yang pertama kali melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) yang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, dan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003) (Selanjutnya disebut UU MK). Jika dilihat dari perubahan UU MK, tugas dan kewenangan MK tidak ada yang diubah, ditambahkan ataupun dikurangi, yang berubah hanya pada bagian jabatan hakim MK. Artinya, MK tetap menjalankan tugas dan kewenangan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Seperti yang telah disinggung di atas, keberadaan MK dalam UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dengan konsep supremasi konstitusi yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. MK difungsikan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*). Hal itu ditandai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"*. Supremasi konstitusi yang ditandai dengan perubahan kedudukan MPR, serta munculnya lembaga negara lain sebagai pelaku kedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa ide dasar penataan struktur negara dalam UUD 1945 dilandaskan pada konsep hubungan *"checks and balances"* yang sekaligus menjadi tujuan negara.

Sebagai lembaga penjaga konstitusi MK dalam kewenangannya berwenang menguji UU terhadap UUD 1945, baik secara formil (pembentukan UU) atau secara materiil (materi UU). Sejak MK berdiri dari tahun 2003 sampai sekarang, MK telah menguji sebanyak 1549 pengujian UU terhadap UUD 1945. Dalam proses pengujian itu, MK tidak saja mengoreksi UU berdasarkan UUD 1945, tapi juga telah merubah substansi UUD 1945 tanpa mengubah teksnya. Hal ini jika dilihat dari UU Kekuasaan Kehakiman seperti yang telah disinggung di atas menjadi problematik, karena UU Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan berdasarkan frasa "negara", "berdasarkan Pancasila", dan "demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Problematika itu terjadi ketika melihat putusan yang dikeluarkan pengadilan, dimana ''kekuasaan kehakiman'' harusnya merdeka, bukan tunduk terhadap ''negara'' dalam pengertian pemerintah. Dengan frasa seperti itu, tidak menutup kemungkinan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah mengintervensi putusan pengadilan.

D. Penutup

Pasca reformasi terjadi perubahan kekuasan kehakiman dalam negara hukum Indonesia, meskipun begitu perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman masih memuat frasa tentang "negara", berdasarkan pancasila dan berdasarkan negara hukum republik Indonesia, artinya kesuasaan kehakiman dijalankan dengan merdeka tanpa interpensi eksekutif dan legislatif dan lembaga yang lain. Sebagai lembaga penjaga konstitusi MK dalam kewenangannya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, baik secara formil (pembentukan UU) atau secara materil (materi UU), dalam proses pengujian itu MK tidak saja mengoreksi undang-undang berdasarkan UUD 1945, tapi juga telah merubah substansi UUD 1945 tanpa mengubah teksnya.

Daftar Pustaka

Ahcmad Surya, 2021, *Kekuasaan Kehakiman* dalam *Ilmu Negara*, Widina Bhakti Persada Bandung, Cetakan Pertama, Bandung.

Bambang Soetiyoso, Sri Hastuti Puspita Sari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yokyakarta

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999, *Dasar-dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia : Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008),

Khairul Fahmi et al., *Dinamika perlindungan hak konstitusional warga : Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia*, ed. Ismail Hasani (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2013), 90–91, https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2014/11/140616-buku-riset-mk.pdf. Fakultas Hukum Universitas Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif) kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia* (Padang: Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010).

LJ. van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-18, PradnyaParamitha, Jakarta, 1981

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya" (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004).

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, 2009Jakarta

Marjanne Termorshuizen, dalam Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan (Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Saldi Isra, 2014, *Kekuasaan Kehakiman dalam Transisi Ploitik di Indonesia* dalam *Problemantikan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Saldi Isra, 2020, *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional,* PT RajaGrafindo Persada, Depok

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III

Suparman Marzuki, 2018, *Menimbang Hakim Sebagai Pejabat Negara Kekuasaan Kehakiman* dalam *Meluruskan Arah Manjemen Kekuasaan Kehakiman*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta.

Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Kencana, 2011).

Tim Penyunting Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998),.

Azhary, (1995), *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, (2017), *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Nur, S. R, (1985), *Membina Hukum Adat Menjadi Hukum Penghayatan Pancasil Dalam Bidang Hukum" Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*. Eresco.

Prasetyo, Dossy Iskandar dan Tanya Bernard L, (2011), *Hukum Etika dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Gentha Publishing.

Sutrisno, Endang (2009), *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.

Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010

Khairul Fahmi, "Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan Negara," *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal.* 4, no. 1 (2020)

Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009).

Madaskolay Viktoris Dahoklory, "Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 2 (2021).

Saldi Isra, *The Development of the Rule of Law in Indonesia*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

https://jendelahukum.com